

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menetapkan bahwa pemerintah daerah baik pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri.

Adanya kedua Undang-Undang diatas mensyaratkan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan, perubahan yang terjadi memberi kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Otonomi daerah adalah penyerahan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Peningkatan hak atau kewenangan harus

diimbangi dengan peningkatan kinerja termasuk kinerja keuangan dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Menurut Mahmudi (2010) laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan.

Laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi saja karena bersifat historis, sehingga timbul kesenjangan kebutuhan informasi.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut. Kesenjangan kebutuhan informasi dapat diatasi dengan cara mengolah kembali laporan keuangan, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan melakukan prediksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun sudah dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, nyatanya tidak semua pembaca laporan dapat memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan dengan baik. Ketidakmampuan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan agar pengguna dapat mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan.

Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2010). Beberapa jenis rasio keuangan seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas dan analisis profitabilitas kurang relevan untuk sektor publik. Rasio-rasio tersebut lebih cocok untuk sektor bisnis yang mencari laba. Sementara itu, informasi laba yang tidak tersedia pada sektor publik menyebabkan analisis keuangan yang biasa digunakan pada sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah diproksikan dengan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kemampuan keuangan daerah diproksikan dengan perhitungan *share and growth*, dan peta kemampuan keuangan daerah. Perhitungan dari masing-masing rasio dilakukan analisis dengan cara merata-ratakan rasio keuangan per daerah dan membandingkan rasio antar satu daerah dengan daerah lainnya pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara Internasional. Masyarakat kini telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik.

Bisma dan Susanto (2010) melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. Penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan analisis kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dengan tingkat

kemandirian 54,48%, tingkat ketergantungan 77,93%, dan tingkat efisiensi belanja daerah sebesar 109,93% atau tidak efisien.

Pratiwi (2017) melakukan penelitian tentang Evaluasi Kinerja dan Kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Proksi pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio keserasian belanja, sedangkan proksi pada pengukuran kemampuan keuangan menggunakan perhitungan *share and growth*, peta kemampuan keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki kriteria delegatif, rasio derajat desentralisasi kriteria baik, rasio efektivitas kriterianya sangat efektif, rasio aktivitas menunjukkan lebih banyak menggunakan dana untuk aparatur dibandingkan dengan belanja publik, rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan dana untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Pertumbuhan *share and growth* tinggi, peta kemampuan keuangan daerah menunjukkan kuadran I, dan indeks kemampuan keuangan menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sedang.

Penelitian ini mengambil objek pada kabupaten/kota di Sumatera Barat karena dari tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa daerah di Sumatera Barat belum mandiri. Hal ini dikarenakan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah retribusi dan masih tingginya pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada

kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk melihat keberhasilan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukanlah suatu penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan ebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016 jika diprosikan dengan rasio efisiensi PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama tahun 2012-2016 jika diprosikan dengan dengan perhitungan *Share and Growth* dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatra Barat jika diprosikan dengan menggunakan rasio efektifitas penerimaan PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio rasio keserasian, dan

rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

2. Menilai kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tahun 2012-2016 jika diproksikan dengan pertumbuhan *Share and Growth* dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang kinerja keuangan dan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan diteliti meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan empat rasio keuangan dan pertumbuhan *share and growth*, serta peta kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian ini.